

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1. Gambaran Umum Nagari Bukik Batabuah

3.1.1. Profil Nagari Bukik Batabuah

Nagari Bukik Batabuah merupakan salah satu dari 82 nagari yang terdapat di Kabupaten Agam dan secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Canduang. Pusat pemerintahan nagari berlokasi di Kubu Apa, Jorong Batabuah Koto Baru. Secara administratif, Nagari Bukik Batabuah terbagi atas empat jorong yang mencakup 16 kampung. Keempat jorong tersebut terdiri atas Jorong Silasiah, Jorong Gobah, Jorong Kubang Duo Koto Panjang, dan Jorong Batabuah Koto Baru. Adapun informasi terkait lokasi pusat pemerintahan masing-masing jorong serta luas wilayahnya disajikan dalam tabel berikut.:

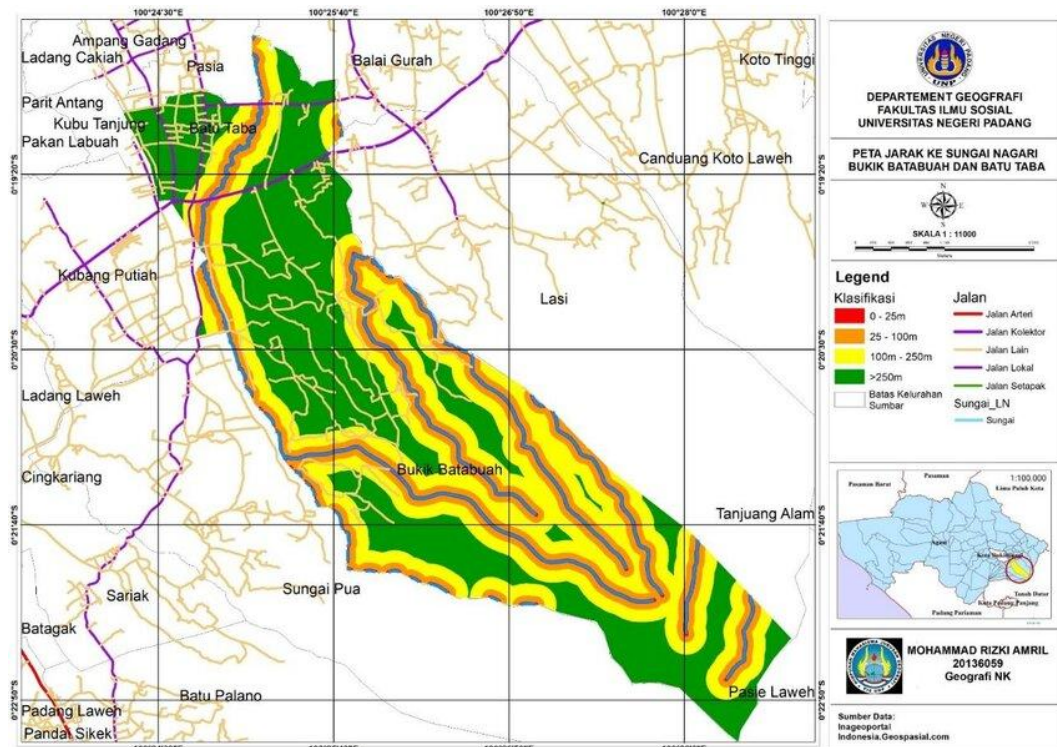
Tabel 3.1 Pembagian Jorong Nagari Bukik Batabuah

No	Nama Jorong	Luas Wilayah (ha)	Ibu Kota Jorong
1.	Batang Silasiah	354 ha	Ponggok
2.	Gobah	281 ha	Gobah
3.	Kubang Duo Koto Panjang	268 ha	Pakan Kamih
4.	Batabuah Koto Baru	219 ha	Kubu Apa

Sumber: Kantor Walinagari Bukik Batabuah

Keempat jorong di Nagari Bukik Batabuah memiliki karakteristik wilayah yang berbeda, dengan Jorong Batang Silasiah sebagai kawasan terluas yaitu 354 hektare dengan pusat kegiatan berada di Ponggok. Jorong Gobah memiliki luas 281 hektare dan berpusat di wilayah Gobah. Selanjutnya, Jorong Kubang Duo Koto Panjang mencakup area seluas 268 hektare dengan Pakan Kamih sebagai pusat jorong. Terakhir, Jorong Batabuah Koto Baru memiliki luas 219 hektare dan beribukotakan Kubu Apa.

- Letak geografis, batas wilayah dan Peta Nagari Bukik Batabuah dan di lihat dari gambar berikut :



Gambar 3. 1 Peta Nagari Bukik Batabuah

Letak Geografis dan Batas Wilayah Nagari Bukik Batabuah berada pada koordinat $100^{\circ}30'-100^{\circ}31'$ BT dan $0^{\circ}25'-0^{\circ}27'$ LS, dengan total luas sekitar ± 1.122 hektare ($11,22 \text{ km}^2$). Adapun batas-batas wilayahnya ialah:

- Utara : Nagari Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek
- Timur : Nagari Lasi, Kecamatan Canduang
- Selatan : Gunung Marapi
- Barat : Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, serta Nagari Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua

b. Kondisi Topografi dan Lingkungan

Nagari Bukik Batabuah berada di wilayah lereng Gunung Marapi dengan ketinggian mencapai lebih dari 910 meter di atas permukaan laut. Kondisi geografis tersebut didukung oleh tingkat curah hujan tahunan yang relatif tinggi, yaitu sekitar 2.000–3.000 mm per tahun. Sementara itu, suhu udara rata-rata di wilayah Nagari Bukik Batabuah berada pada kisaran $18,5^{\circ}\text{C}$. Kondisi geografis dan iklim tersebut membentuk karakter lingkungan yang

sejuk serta mendukung berbagai aktivitas pertanian dan kehidupan masyarakat setempat dengan jabaran sebagai berikut:

Tabel 3.2 Topografi Nagari Bukik Batabuah

No	Kondisi	Uraian
1.	Ketinggian Tanah dari permukaan laut	910 mdpl
2.	Topografi	Dataran Tinggi
3.	Suhu udara rata-rata	18,5°c
4	Curah hujan rata-rata pertahun	2.000-3.000 mm

Sumber: Kantor Walinagari Bukik Batabuah

Jumlah penduduk Nagari Bukik Batabuah tercatat sebanyak 9.888 jiwa, yang terdiri dari 5.023 penduduk laki-laki dan 4.865 penduduk perempuan. Distribusi penduduk di setiap jorong menunjukkan adanya perbedaan jumlah yang cukup signifikan. Jorong Batang Silasiah memiliki jumlah penduduk paling banyak, yaitu sebanyak 3.538 jiwa, sedangkan Jorong Batabuah Koto Baru memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yakni 1.226 jiwa. Sementara itu, Jorong Gobah dihuni oleh 2.467 jiwa dan Jorong Kubang Duo Koto Panjang memiliki 2.657 jiwa. Perbedaan jumlah penduduk tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduk pada masing-masing jorong tidak sama. Ditinjau dari struktur usia, sebagian besar penduduk berada pada kelompok usia produktif, yaitu di atas 15 tahun hingga di bawah 56 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa Nagari Bukik Batabuah memiliki potensi sumber daya manusia dan tenaga kerja yang cukup besar. rinciannya dijelaskan pada table berikut:

Tabel 3.3. Jumlah Penduduk Nagari Bukik Batabuah

No	Jorong	Jumlah	
		Jiwa	KK
1.	Batang Silasiah	3538	907
2.	Gobah	2467	638
3.	Kubang Duo Koto Panjang	2657	647
4.	Batabuah Koto Baru	1226	326

Jumlah	9888	2518
---------------	-------------	-------------

Sumber: Kantor Walinagari Bukik Batabuah

Struktur penduduk Nagari Bukik Batabuah menunjukkan komposisi yang beragam pada setiap kelompok umur, dengan total 9.888 jiwa yang terdiri dari 5.023 laki-laki dan 4.865 perempuan. Kelompok usia produktif mendominasi, terutama rentang umur 26–44 tahun yang mencapai 2.548 jiwa, disusul oleh kelompok usia 45–59 tahun sebanyak 1.642 jiwa. Penduduk usia anak-anak dan remaja juga memiliki proporsi yang signifikan, seperti kelompok usia 6–11 tahun dengan 1.076 jiwa dan usia 0–5 tahun dengan 884 jiwa. Sementara itu, penduduk lanjut usia berusia 60–69 tahun tercatat 592 jiwa, dan yang berusia di atas 70 tahun berjumlah 395 jiwa. Secara keseluruhan, distribusi ini mencerminkan bahwa nagari memiliki potensi sumber daya manusia yang kuat pada usia produktif, sekaligus populasi usia muda yang menandakan keberlanjutan demografis yang baik, dari penjelasan tersebut dapat di lihat dari tabel berikut:

Tabel 3. 4 Jumlah penduduk Nagari Bukik Batabuah menurut umur

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-5 tahun	488	396	884
2.	6-11 tahun	548	528	1076
3.	12-14 tahun	299	289	588
4.	15-17 tahun	324	312	636
5.	18-21 tahun	378	388	766
6.	22-25 tahun	408	353	761
7.	26-44 tahun	1339	1209	2548
8.	45-59 tahun	791	851	1642
9.	60-69 tahun	281	311	592
10.	>70 tahun	167	228	395
Jumlah		5023	4865	9888

Sumber: Kantor Walinagari Bukik Batabuah

Selanjutnya wilayah Nagari Bukik Batabuah terbagi ke dalam lima zona pemanfaatan lahan yang menunjukkan keragaman fungsi ruang di nagari tersebut. Kawasan perdagangan memiliki luasan sekitar 0,87 hektare dan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Area persawahan yang mencapai 311 hektare berperan penting sebagai sumber produksi pangan, sedangkan kawasan perkebunan seluas 471,1 hektare menjadi pendukung utama komoditas pertanian dataran tinggi. Di samping itu, kawasan perumahan mencakup area yang cukup luas, yaitu sekitar 980 hektare, menggambarkan penyebaran pemukiman masyarakat. Sementara itu, sekitar 248,2 hektare lainnya digunakan untuk berbagai keperluan lain, termasuk fasilitas umum dan ruang terbuka. Adapun rinciannya dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 3.5 Ketersediaan Kawasan Nagari Bukik Batabuah

No	Ketersediaan Kawasan	Luas (Ha)
1.	Kawasan Perdagangan	0,87
2.	Kawasan Persawahan	311,00
3.	Kawasan Perkebunan	471,10
4.	Kawasan Pemukiman	90,80
5.	Kawasan Lain-lain	248,20

Sumber: Kantor Walinagari Bukik Batabuah

3.1.2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Masyarakat Nagari Bukik Batabuah dikenal memiliki ikatan kekeluargaan non-sedarah yang sangat kuat, sehingga setiap keputusan penting selalu ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Forum musyawarah ini rutin diadakan setiap tahun sebagai sarana untuk menyelaraskan berbagai kepentingan dan merumuskan agenda sosial kemasyarakatan di nagari. Salah satu kegiatan tahunan yang menjadi tradisi adalah program *Nagari Bersih*. Pada bulan Rajab atau Sya'ban, seluruh warga bergotong royong membersihkan jalan-jalan utama nagari sebagai bentuk persiapan menyambut bulan suci Ramadhan. Tradisi ini tidak hanya menjaga

kebersihan lingkungan, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan dan mempererat hubungan antar masyarakat. Selain kegiatan kebersihan, warga turut aktif dalam gotong royong pembangunan fasilitas keagamaan seperti jalan menuju masjid dan musholla, pembangunan sarana ibadah, serta berbagai proyek pembangunan lainnya di Nagari Bukik Batabuah. Masyarakat juga secara konsisten menyelenggarakan beragam kegiatan yang berkaitan dengan adat, budaya, dan keagamaan sebagai bagian dari pelestarian nilai-nilai lokal. sebagaimana rincian berikut:

- Kegiatan Bidang Adat :
1. Batagak Panghulu
 2. Pembentukan Tuo Kampuang
 3. Perjanjian Adat
 4. Pembinaan Bundo Kanduang
 5. Goro Nagari setiap bulan Raja/Sya'ban
 6. Sumarak Padang/Deklarasi Buek

- Kegiatan Bidang Budaya :
1. Perguruan Silat
 2. Perguruan Pasambahan
 3. Dikia Rebana
 4. Randai
 5. Tabuik

- Kegiatan Bidang Keagamaan :
1. Majelis Ta'lim Nagari setiap bulan
 2. Peringatan Hari Besar Islam
 3. LDS setiap bulan
 4. Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah
 5. Pengajian Adat
 6. Khatam Al-Qur'an
 7. Yatim Tersenyum Kerjasama dengan

IKBB

Di Nagari Bukik Batabuah saat ini telah memiliki organisasi Yatim Tersenyum yang berdiri pada tahun 2015 dan organisasi ini bekerja sama dengan Ikatan Perantau Bukik Batabuah (IKBB) dan masyarakat yang ada di kampung halaman.

a. Mata Pencaharian Utama Penduduk

Mata pencaharian utama atau profesi masyarakat Nagari Bukik Batabuah adalah Petani, namun beberapa profesi lain diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3.6 Mata Pencaharian Masyarakat

No.	Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	Jumlah
1.	PNS	169 Orang
2.	Guru	68 Orang
3.	Wiraswasta	1.798 Orang
4.	Petani	1.154 Orang
5.	Buruh	0 Orang

Sumber: Ikatan Perantau Bukik Batabuah (IKBB)

Kegiatan ekonomi masyarakat di Nagari Bukik Batabuah menunjukkan dinamika yang beragam dan saling mendukung, mulai dari keberadaan pusat peternakan kambing peranakan etawa layak bibit yang menjadi sumber pengembangan ternak unggulan, diikuti dengan pengolahan hasil pertanian seperti produksi gula semut dan brownis saka yang menambah nilai ekonomi dari komoditas lokal. Aktivitas pasar melalui pengembangan pasar jorong memperkuat distribusi dan perdagangan harian masyarakat, sementara kilangan tebu saka menjadi sektor pengolahan tradisional yang tetap produktif. Selain itu, budidaya strawberry turut memperkaya portofolio ekonomi setempat, menciptakan peluang agribisnis baru yang relevan dengan potensi agroklimat wilayah tersebut.

b. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Masyarakat Nagari Bukik Batabuah memiliki tingkat pendidikan yang beragam yang dipengaruhi oleh beragam kondisi dan situasi sosial. Keterbatasan ekonomi serta perbedaan motivasi dalam melanjutkan pendidikan menjadi faktor utama yang menyebabkan variasi tersebut. Secara umum, pendidikan masyarakat berada pada jenjang SMA dan sarjana. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi kondisi pendidikan tersebut meliputi:

1. Faktor Keluarga

Keluarga berperan sebagai lembaga pendidikan pertama bagi anak, tempat ia menyerap nilai, kebiasaan, dan pemahaman dari orang tua maupun orang dewasa di sekitarnya. Nilai-nilai yang ditanamkan di lingkungan keluarga cenderung melekat dan diyakini sebagai kebenaran hingga dewasa. Oleh karena itu, keluarga diharapkan mampu menjadi ruang yang baik bagi anak dalam memperoleh pendidikan moral dan perilaku positif. Pembinaan karakter sejak dini akan membantu anak memiliki pemahaman mengenai perilaku yang diperbolehkan maupun yang harus dihindari ketika memasuki dunia sekolah.

2. Faktor Sekolah

Sekolah merupakan institusi penting yang membentuk kemampuan akademik sekaligus sosial anak. Di lingkungan sekolah, siswa mulai berinteraksi dengan individu dari latar belakang, pola asuh, dan nilai-nilai yang berbeda. Interaksi tersebut memungkinkan terjadinya proses penyesuaian dan pembentukan karakter melalui pengaruh teman sebaya. Oleh sebab itu, pemilihan lingkungan pertemanan yang tepat sangat penting agar siswa tidak terbawa pada perilaku negatif.

3. Faktor Lingkungan

Lingkungan tempat tinggal siswa turut memengaruhi keberhasilan pendidikan. Pendidikan yang baik di keluarga maupun sekolah dapat terhambat jika anak berada pada lingkungan sosial yang kurang kondusif, misalnya kelompok yang sering terlibat dalam kenakalan atau konflik. Hal

inilah yang mendorong sebagian orang tua memilih sekolah berasrama agar anak memiliki lingkungan belajar yang lebih terarah dan aman.

4. Faktor Fisiologis

Kondisi fisik atau kesehatan siswa, baik sehat maupun mengalami penyakit atau cacat tertentu, berpengaruh pada kemampuan menerima pelajaran. Ketika siswa sakit, kemampuan konsentrasi menurun sehingga materi yang disampaikan guru sulit dipahami secara optimal.

5. Faktor Psikologis

Keadaan psikologis siswa berperan besar dalam menentukan kualitas belajar. Masalah di keluarga, tekanan emosional, atau pengalaman perundungan dapat menurunkan fokus, motivasi, dan rasa percaya diri siswa. Kondisi ini pada akhirnya menghambat proses belajar dan pencapaian akademik.

c. Praktik budaya dan kearifan lokal masyarakat dalam menghadapi bencana.

Kondisi topografis Nagari Bukik Batabuah yang terletak di kawasan lereng Gunung Marapi pada ketinggian kurang lebih 910 meter di atas permukaan laut menyebabkan wilayah tersebut memiliki karakteristik geomorfologi yang relatif rawan terhadap berbagai jenis bencana alam, khususnya bencana yang dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik. Kedekatan wilayah ini dengan pusat erupsi Gunung Marapi menjadikannya berada dalam zona ancaman primer dan sekunder, salah satunya berupa banjir lahar dingin. Risiko ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa sebagian besar aliran sungai yang melintasi Nagari Bukik Batabuah merupakan bekas jalur aliran lahar dari letusan Marapi yang terjadi ratusan hingga ribuan tahun silam. Kondisi geomorfologi historis tersebut menciptakan pola aliran sungai yang rawan membawa material vulkanik saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi.

Situasi tersebut mendorong masyarakat setempat untuk memiliki kapasitas kesiapsiagaan yang kuat, baik dalam bentuk kesiapan psikologis maupun prosedural. Seiring waktu, terbentuklah berbagai praktik sosial dan

kearifan lokal yang berfungsi sebagai mekanisme adaptasi masyarakat terhadap ancaman banjir lahar dingin. Kearifan lokal ini tidak hanya berperan dalam mitigasi risiko, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat ketahanan komunitas.

Adapun bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat Nagari Bukik Batabuah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sistem Pemberitahuan Antisipatif

Masyarakat yang menetap di wilayah hulu sungai memiliki peran strategis sebagai “penjaga alami” kondisi debit air. Ketika mereka melihat adanya peningkatan volume air yang signifikan, perubahan warna air, atau karakteristik aliran yang menunjukkan potensi bahaya, mereka segera menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat yang tinggal di sepanjang jalur sungai. Mekanisme penyampaian informasi ini dilakukan secara cepat melalui jaringan komunikasi informal yang sudah mengakar kuat, sehingga masyarakat di hilir dapat segera mengambil langkah antisipatif sebelum bahaya muncul.★

2. Persiapan dan Perlindungan Ketika Ancaman Muncul

Setelah menerima informasi mengenai potensi bahaya, masyarakat yang tinggal di daerah rawan akan melakukan rangkaian tindakan persiapan. Tindakan tersebut mencakup menjauhi tepian sungai, mengamankan anggota keluarga, serta menuju titik-titik yang dinilai aman dari jangkauan aliran lahar dingin. Langkah-langkah ini dilakukan berdasarkan pengalaman kolektif yang telah dipelajari secara turun-temurun, sehingga masyarakat memiliki respons cepat dan terarah ketika menghadapi situasi darurat.

3. Gotong Royong dan Upaya Pemulihan Pasca Bencana

Pasca terjadinya banjir lahar dingin dan setelah aliran air kembali normal, masyarakat secara swadaya melaksanakan kegiatan pemulihan lingkungan. Mereka mengevakuasi korban yang terdampak, memberikan pertolongan pertama sebelum bantuan resmi datang, serta membersihkan

jalanan dan aliran sungai yang tersumbat oleh material vulkanik. Aktivitas gotong royong ini tidak hanya mempercepat proses pemulihan fisik wilayah, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial yang menjadi fondasi utama ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.

3.2. Kondisi Dokumentasi Nagari Bukik Batabuah Pasca Bencana

Pada awal 2024 hingga pertengahan tahun, Kabupaten Agam mengalami rangkaian bencana alam beruntun, mulai dari erupsi Gunung Marapi hingga banjir lahar dingin yang memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Sejumlah kerugian material dan korban jiwa terjadi, terutama di wilayah sekitar lereng Marapi. Salah satu kejadian paling menonjol ialah banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah yang terjadi berulang dalam kurun dua bulan tepatnya pada 5 April, 26 April, serta peristiwa terbesar pada malam 11 Mei.

Banjir lahar dingin pada 11 Mei 2024 berlangsung mulai pukul 21.00 hingga 24.00 WIB, dipicu oleh hujan lebat yang turun selama beberapa hari sebelumnya. Intensitas hujan tersebut meningkatkan debit aliran di hulu sungai, membawa material vulkanik berupa batu-batu besar hingga dahan pohon. Struktur aliran sungai yang berkelok menyebabkan gesekan arus yang kuat tidak tersalurkan dengan baik, sehingga air menghantam sisi aliran dan memecah keluar menuju area pertanian.

Situasi mencapai puncaknya di sekitar jembatan pada ruas jalan Simpang Bukik, Jorong Kubang Duo Koto Panjang. Jembatan tersebut memiliki konstruksi yang kurang memadai, dengan ruang aliran yang sempit dan pondasi berada tepat di tengah jalur air. Kombinasi sempitnya alur sungai dan kuatnya debit menyebabkan material hanyutan tersangkut di kaki jembatan. Akibatnya, aliran air terhambat, meluap, dan kemudian menerjang permukiman warga.

Dampaknya sangat besar: 32 rumah terdampak, 17 di antaranya rusak berat; 9 warga meninggal; 156 jiwa terdampak; 32 hektare lahan pertanian

mengalami kerusakan; serta 30 UMKM turut terkena imbas. Kondisi Nagari Bukik Batabuah setelah bencana periode kedua ini sangat memprihatinkan. Material batu, lumpur, dan dahan pohon menumpuk di jalan, lahan pertanian tertimbun, korban yang terseret arus ditemukan di berbagai lokasi, serta kendaraan warga banyak yang hanyut hingga tersangkut di pepohonan, terbalik, atau masuk ke rumah penduduk. Dampak sosial-ekonomi juga terasa signifikan, mulai dari hilangnya mata pencaharian, terganggunya aktivitas pendidikan, hingga trauma psikologis pada anak-anak.

Dalam menghadapi situasi ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam bersama berbagai organisasi perangkat daerah dan elemen masyarakat menjalankan upaya penanggulangan bencana secara terpadu.

Gambar 3.2 Proses Evakuasi Korban



3.2.1. Proses Evakuasi Korban Bencana Banjir Lahar Dingin

Proses evakuasi korban banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah dilaksanakan secara terpadu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama TNI/Polri, Tim SAR, Kelompok Siaga Bencana Nagari, serta masyarakat setempat. Upaya awal difokuskan pada pencarian dan

penyelamatan korban yang terjebak aliran material vulkanik, lumpur, serta reruntuhan bangunan. Tim gabungan melakukan penyisiran di sepanjang alur sungai, permukiman terdampak, dan area-area yang berpotensi menjadi titik kumpul material banjir.

Evakuasi dilakukan dengan memanfaatkan peralatan seperti perahu karet, kendaraan taktis, lampu penerangan, dan alat pemotong material kayu untuk membuka akses yang tertutup.

Pada saat yang bersamaan, tim medis dan relawan lainnya mendirikan posko darurat untuk menampung korban selamat dan memberikan pertolongan pertama. Para petugas juga mengoordinasikan distribusi logistik, identifikasi korban, serta pengalihan warga ke zona aman guna menghindari risiko banjir susulan. Kerja sama yang kuat antarinstansi serta keterlibatan aktif masyarakat mempercepat proses penyelamatan dan memastikan bahwa penanganan korban berjalan secara efektif, cepat, dan sesuai dengan prosedur tanggap darurat bencana.

3.2.2. Proses Pembenahan Lingkungan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama unsur TNI/Polri, Tim SAR, Kelompok Siaga Bencana Nagari Bukik Batabuah, serta



masyarakat setempat menjalankan kegiatan pembersihan lingkungan sebagai langkah lanjutan pascabencana banjir lahar dingin. Kegiatan ini meliputi pembersihan material berupa batuan vulkanik, lumpur, dan batang pohon yang menutupi jalan, permukiman, serta area fasilitas umum. Proses normalisasi aliran sungai juga dilakukan untuk mencegah terjadinya penyumbatan kembali yang berpotensi memicu banjir susulan. Alat berat dikerahkan untuk mempercepat pembersihan material dalam jumlah besar, sementara petugas lapangan bersama relawan membuka akses jalan yang tertutup agar mobilitas masyarakat bisa kembali berjalan.

Gambar 3.3 Proses pembersihan lingkungan pasca Bencana

Selain itu, upaya perbaikan lingkungan turut difokuskan pada pemulihan lahan pertanian yang tertimbun lumpur serta penataan kembali infrastruktur dasar yang mengalami kerusakan. BPBD dan tim gabungan mendirikan pusat koordinasi lapangan untuk mengatur alur kegiatan pembersihan, termasuk pendataan kerusakan, penyaluran bantuan alat kebersihan, dan pendampingan masyarakat dalam proses pemulihan awal. Kolaborasi lintas lembaga dan keterlibatan aktif warga memperkuat efektivitas penanganan pascabencana, sehingga proses pemulihan sosial, ekonomi, dan lingkungan dapat berjalan lebih cepat dan terarah.

3.2.3. Proses Pembenahan Lahan Pertanian

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama unsur TNI/Polri, Tim SAR, Kelompok Siaga Bencana Nagari Bukik Batabuah, serta masyarakat turut melaksanakan pembenahan lahan pertanian yang mengalami kerusakan akibat banjir lahar dingin. Upaya ini berfokus pada pembersihan material yang menimbun lahan seperti lumpur tebal, pasir vulkanik, bebatuan, dan sisa-sisa kayu yang terbawa arus. Petani dibantu untuk mengidentifikasi bagian lahan yang masih bisa diselamatkan dan menentukan langkah prioritas pemulihan. Dalam beberapa lokasi, alat berat digunakan untuk mengangkat material dalam jumlah besar sementara relawan dan warga membersihkan area yang bisa ditangani secara manual.



Gambar 3.4 Proses pembenahan lahan pertanian

Selain pembersihan, proses pemulihan lahan juga mencakup penataan kembali saluran irigasi yang terputus atau rusak agar distribusi air ke sawah dan kebun kembali normal. Dinas pertanian bersama BPBD memberikan pendampingan terkait rehabilitasi tanaman, termasuk penyediaan bibit pengganti bagi lahan yang gagal panen total. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses ini mempercepat pemulihan produktivitas pertanian dan membantu memulihkan stabilitas ekonomi keluarga petani pascabencana.

3.3. Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam

3.3.1. Sejarah pembentukan BPBD Kabupaten Agam

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan bagian dari perkembangan sistem penanggulangan bencana yang mencakup berbagai jenis bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, maupun bencana lainnya. Perkembangan penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut tidak terlepas dari pengaruh kondisi, ruang lingkup, serta paradigma yang berkembang dalam pengelolaan kebencanaan. Berbagai potensi bencana yang dipengaruhi oleh faktor geografis, geologis, hidrologis, dan demografis menjadi salah satu pertimbangan bagi Kabupaten Agam dalam merumuskan upaya peningkatan kesiapsiagaan dan kapasitas daerah dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.

Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak geologisnya yang berada pada zona pertemuan Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eurasia, serta keberadaan dua sesar utama yang membentang dengan arah barat-laut–tenggara di Pulau Sumatera, yaitu Sesar Sumatera dan Sesar Mentawai. Selain itu, wilayah Kabupaten Agam juga memiliki karakteristik geografis berupa jajaran Pegunungan Bukit Barisan dan sejumlah gunung api. Kondisi tersebut menyebabkan Kabupaten Agam menghadapi berbagai potensi ancaman bencana atau *multi-hazard*, di antaranya gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, gelombang ekstrem dan abrasi, erupsi gunung api, kekeringan, serta kebakaran.

Peristiwa gempa bumi yang terjadi pada 30 September 2009 di Sumatera Barat serta gempa bumi Mentawai pada tahun 2010 memberikan dampak yang signifikan terhadap Kabupaten Agam. Pengalaman dalam menghadapi dan menangani bencana pada periode tersebut menjadi salah

satu momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Agam untuk meningkatkan tata kelola penanggulangan bencana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan sejumlah kendala mendasar, seperti lemahnya koordinasi antarlembaga, adanya kepentingan sektoral, pola penanganan yang belum terintegrasi, serta keterbatasan sumber daya anggaran. Berbagai pengalaman tersebut kemudian menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dalam mengembangkan sistem penanggulangan bencana yang lebih terpadu, terencana, terkoordinasi, dan komprehensif.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Daerah, khususnya Pasal 4 angka 1, menetapkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab sebagai penyelenggara penanggulangan bencana di wilayahnya. Setelah terjadinya bencana besar di Sumatera Barat pada tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Agam membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada tahun 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan BPBD Kabupaten Agam. Dalam upaya memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana, pada tahun 2011 BPBD Kabupaten Agam menjalin kerja sama dengan Oxfam Inggris Raya yang selanjutnya bermitra dengan Jemari Sakato. Kerja sama tersebut diarahkan untuk mendorong penyusunan dan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Agam mengenai penanggulangan bencana melalui program Membangun Ketahanan Masyarakat terhadap Bencana dan Perubahan Iklim di Sumatera Barat.

Pada masa awal pembentukannya pada tahun 2010, BPBD Kabupaten Agam masih berada dalam satu kelembagaan dengan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam. Namun, seiring dengan perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah Kabupaten Agam pada tahun 2017, terjadi pemisahan kelembagaan antara BPBD dan Pemadam Kebakaran. Sejak saat itu, BPBD Kabupaten Agam berdiri sebagai perangkat daerah tersendiri, sedangkan

urusan Pemadam Kebakaran bergabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

3.3.2. Struktur organisasi BPBD Kabupaten Agam

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 01 Tahun 2010 mengenai Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BPBD, sebagaimana tercantum dalam Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 01. Landasan hukum ini menjadi dasar pembentukan struktur organisasi yang berfungsi mengoordinasikan seluruh upaya penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Agam. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kepala BPBD Kabupaten Agam mendapatkan dukungan dari Unsur Pelaksana. Susunan organisasi BPBD terdiri atas:

a. Kepala

Kepala BPBD Kabupaten Agam berperan sebagai koordinator utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawabnya mencakup pengintegrasian seluruh kegiatan penanggulangan bencana melalui koordinasi dengan SKPD terkait dan lembaga lintas sektor, sehingga kebijakan dan tindakan penanganan bencana dapat terlaksana secara efektif dan berkesinambungan.

b. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah merupakan unsur nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD. Unsur ini berfungsi sebagai pemberi rekomendasi strategis, pertimbangan profesional, serta masukan kebijakan kepada Kepala BPBD. Peran Unsur Pengarah sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan penanggulangan bencana berjalan sesuai prinsip kehati-hatian, akurasi, dan efektivitas. Fungsi Unsur Pengarah mencakup:

1. Menyusun konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah sebagai dasar perencanaan;

2. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan teknis di lapangan;
3. Melaksanakan evaluasi terhadap proses dan hasil penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Keanggotaan Unsur Pengarah terdiri dari:

1. Pejabat pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dan kapasitas pengambilan keputusan; dan
2. Anggota masyarakat yang memiliki kompetensi profesional, pengalaman, serta keahlian terkait kebencanaan.

c. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana merupakan unsur struktural yang bertugas menjalankan kegiatan teknis penanggulangan bencana. Unsur ini berada langsung di bawah Kepala Pelaksana BPBD. Ruang lingkup tugas Unsur Pelaksana meliputi seluruh tahapan penanggulangan bencana, yaitu:

1. Tahap prabencana, yang mencakup upaya pencegahan dan mitigasi;
2. Tahap tanggap darurat, yang berfokus pada penyelamatan, evakuasi, dan pemenuhan kebutuhan mendesak;
3. Tahap pascabencana, yang mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Adapun fungsi Unsur Pelaksana meliputi:

1. Koordinasi, yaitu menyinergikan tindakan dengan SKPD lain, instansi vertikal, lembaga usaha, dan pihak terkait pada tahap prabencana dan pascabencana;
2. Pengkomandoan, yaitu mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari berbagai instansi untuk menanggulangi keadaan darurat bencana;
3. Pelaksanaan, yaitu menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana secara sistematis dan terintegrasi sesuai kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

Struktur Unsur Pelaksana mencakup tugas dan fungsi masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Kepala Pelaksana

Bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional harian penanggulangan bencana, termasuk memastikan seluruh fungsi teknis berjalan sesuai prosedur dan arahan strategis BPBD.

2. Sekretariat

Sekretariat mengemban tugas pokok dalam pengelolaan administrasi, sarana prasarana, keuangan, perencanaan, pelaporan, serta urusan internal organisasi. Fungsi Sekretariat mencakup:

- a) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan kesekretariatan untuk memastikan kelancaran tugas dinas.
- b) Menjabarkan peraturan perundang-undangan ke dalam prosedur operasional.
- c) Menyusun rencana strategis organisasi sebagai pedoman pelaksanaan.
- d) Mengelola administrasi internal dan eksternal.
- e) Menyelenggarakan fasilitasi administrasi berdasarkan asas keseimbangan.
- f) Mengatur urusan rumah tangga dinas, persuratan, dan keprotokolan.
- g) Mengelola keuangan organisasi secara akuntabel.
- h) Mengatur tata laksana administrasi organisasi.
- i) Mengelola aspek hukum dan regulasi.
- j) Merumuskan program dan anggaran dinas.
- k) Melaksanakan tugas tambahan sesuai arahan atasan.

Setiap subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris, Struktur Sekretariat terdiri dari:

- a) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- b) Subbagian Keuangan.
- c) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang ini memiliki peran strategis dalam memastikan kesiapan daerah menghadapi potensi bencana Bidang ini terdiri dari dua seksi yaitu Seksi Pencegahan, Seksi Kesiapsiagaan Fungsinya mencakup:

- a) Merumuskan kebijakan teknis terkait pencegahan dan kesiapsiagaan
- b) Mengkoordinasikan implementasi kebijakan umum pada bidang tersebut.
- c) Menjalin hubungan kerja dengan berbagai lembaga dalam upaya pengurangan risiko bencana.
- d) Melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis laporan penyelenggaraan pencegahan dan kesiapsiagaan
- e) Melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk atasan.

Masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang ini menjadi unsur penting dalam penanganan fase tanggap darurat. Tugasnya mencakup koordinasi dan pelaksanaan kebijakan umum penanggulangan bencana pada saat terjadi kedaruratan, Bidang ini terdiri dari Seksi Kedaruratan, Seksi Logistik Fungsinya meliputi:

- a) Merumuskan kebijakan umum terkait tanggap darurat dan penanganan pengungsi.
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan.
- c) Melaksanakan komando dalam penanganan bencana pada fase darurat
- d) Mengelola hubungan kerja dengan instansi terkait dalam penanganan darurat.

- e) Melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan implementasi kebijakan
- f) Melaksanakan tugas tambahan sesuai arahan atasan.

Setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

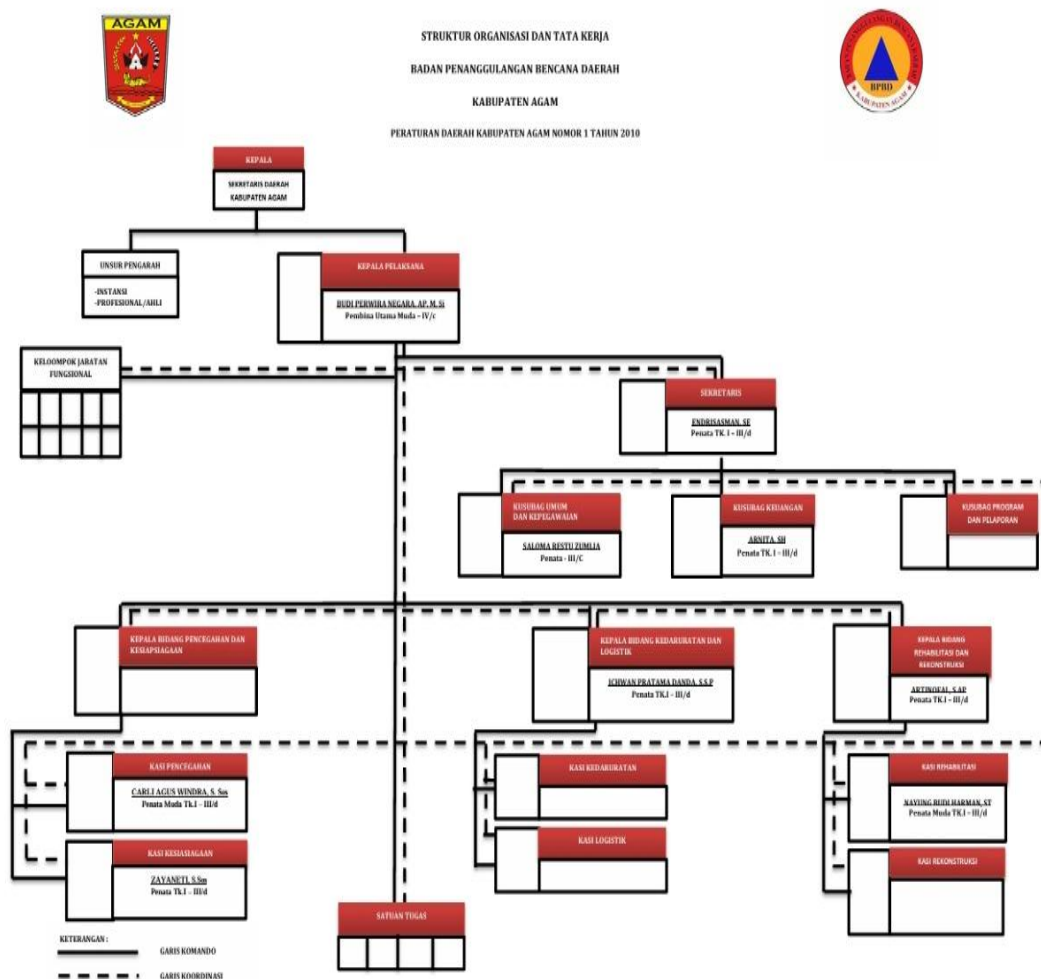
Bidang ini memiliki peran penting dalam pemulihan wilayah pascabencana. Tugasnya mencakup koordinasi kebijakan umum penanggulangan bencana pada tahap pemulihan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari Seksi Rehabilitasi, Seksi Rekonstruksi, Fungsinya meliputi:

- a) Merumuskan kebijakan umum penanggulangan bencana pascabencana.
- b) Mengkoordinasikan dan melaksanakan implementasi kebijakan tersebut.
- c) Mengembangkan hubungan kerja dengan lembaga terkait dalam tahap pemulihan.
- d) Melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis laporan kegiatan pemulihan.
- e) Melaksanakan tugas lain sesuai instruksi atasan.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari Seksi Rehabilitasi, Seksi Rekonstruksi Tugas masing-masing seksi meliputi:

- a) Merumuskan kebijakan teknis sesuai lingkup kerja.
- b) Memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan tugas pemulihan.
- c) Melaksanakan pembinaan terkait pelaksanaan kegiatan pemulihan.
- d) Menjalankan tugas lain dari Bupati sesuai fungsi dan kewenangannya.

Adapun sturktur organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Agam tahun 2024 adalah:



Gambar 3. 5 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Agam

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Agam. Secara kelembagaan, BPBD Kabupaten Agam berfungsi sebagai unsur pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Lembaga ini dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah dan dalam menjalankan tugasnya berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati Agam. Adapun

tugas utama BPBD Kabupaten Agam adalah membantu Bupati Agam dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah, khususnya yang berkaitan dengan bidang penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Agam mempunyai tugas:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan merata;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisidan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- e. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- f. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, BPBD Kabupaten Agam mempunyai fungsi;

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

3.3.3. Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Agam

Secara umum, BPBD Kabupaten Agam berperan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pendukung dalam upaya pengelolaan lingkungan

serta pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Sejalan dengan Misi Ketiga Kabupaten Agam, BPBD Kabupaten Agam merancang sejumlah program dan kegiatan untuk tahun 2024. Program tersebut meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas enam kegiatan utama. Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.225.343.759, kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp3.075.211.860, kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp358.469.354, kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp115.596.945, kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp516.399.600, serta kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp158.666.000.

Keenam kegiatan tersebut pada dasarnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan operasional dasar perangkat daerah, sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Agam dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Program Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Agam mencakup empat kegiatan utama. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp32.150.000, sedangkan Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana dialokasikan sebesar Rp909.921.080. Selanjutnya, Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana mendapatkan anggaran sebesar Rp687.450.600, sementara Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana memperoleh alokasi sebesar Rp113.224.900. Keempat kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana secara menyeluruh, mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana.

Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 disajikan dalam table sebagai berikut:

Tabel 3.7 Program Kegiatan BPBD Kabupaten Agam

No	Program Kegiatan	Capaian Program
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
4.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Agam (BPBD)